

Implementation Of The Corporate Social Responsibility (CSR) Program In Improving Community Welfare In Lubuk Pinang Village Mukomuko District

Implementasi Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko

Liffia Riska Pinda^{1a(*)}, M. Fachri Adnan^{2b}

¹Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat

^aarischaliffya@gmail.com

^bfachriadnan@fis.unp.ac.id

(*) Corresponding Author

arischaliffya@gmail.com

How to Cite: Pinda,L.R. (2024). Implementasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko. doi: 10.36526/js.v3i2.4156

Received: 16-07-2024
 Revised : 30-07-2024
 Accepted: 09-08-2024

Keywords:

Implementation,
 Corporate Social Responsibility
 (CSR),
 Public welfare.

Abstract

This research was motivated by a problem discovered by the Corporate Social Responsibility (CSR) of PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi, Lubuk Pinang Village, there were still several inequalities that occurred which were not in accordance with community expectations. This research aims to analyze the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) carried out by PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi to pay attention to environmental conditions and community welfare and to find out what factors influence them. This research is included in the field research category with a qualitative approach. Data collection techniques use interviews and documentation. The research results show that PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi has indeed implemented Corporate Social Responsibility (CSR), in this case the company has carried out various kinds of social activities towards the environment and society, but there are still several shortcomings and obstacles in the process. Apart from that, there are factors that influence the implementation of PT Sapta Sentosa Jaya Abadi's Corporate Social Responsibility (CSR) program, seen from supporting and inhibiting factors. The supporting factor is the synchronization between the proposals from the buffer villages and the CSR program which works together to implement the CSR program of PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi in improving the welfare of the community in Lubuk Pinang village. Meanwhile, the inhibiting factor that is an obstacle is that CSR which is realized is not yet significant for society.

PENDAHULUAN

Perusahaan merupakan bentuk organisasi yang bertugas untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Dunia usaha sering dianggap sebagai entitas yang mampu memberikan berbagai dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia, seperti membantu pemerintah dalam meningkatkan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, produksi dalam negeri, pemasukan pendapatan negara melalui pajak, serta kesejahteraan nasional. Tujuan perusahaan adalah menghasilkan keuntungan sebanyak mungkin dengan sumber daya yang dimilikinya. Mengoptimalkan nilai perusahaan adalah tujuan utamanya. Bagi para manajer, nilai perusahaan dapat berfungsi sebagai pengukur apa yang diyakini pasar tentang kinerja perusahaan sebelumnya dan bagaimana kemungkinan perkembangan di masa depan.(Rachmawati & Pinem, 2024).

Kehadiran perusahaan di masyarakat memiliki sisi positif dan negatif. Faktanya, keberadaan perusahaan dapat menyebabkan masalah sosial dan lingkungan seperti polusi udara, pembuangan limbah, dan kebisingan dari operasi mesin. Hal seperti ini biasa terjadi saat memulai bisnis dan bisa meresahkan karena berdampak pada masyarakat. (Sulistiyowati dalam Machfudi, 2011). Perusahaan harus memberikan dampak positif pada kehidupan sosial masyarakat, sehingga mereka wajib mengimplementasikan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). CSR adalah komitmen bisnis untuk berperilaku secara etis, beroperasi sesuai hukum, dan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas. Konsep CSR mencakup tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, perusahaan, dan komunitas setempat yang aktif dan dinamis (Marnelly, 2012).

Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) mengatur bahwa perusahaan yang menjalankan usaha di bidang atau terkait dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, perusahaan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Contoh penerapan CSR di Kabupaten Muko-Muko adalah PT Sapta Sentosa Jaya Abadi, yang beroperasi dalam industri kelapa sawit dan berlokasi di Kabupaten Muko-Muko, Provinsi Bengkulu. Kehadiran perusahaan ini memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat lokal dan lingkungan sekitarnya.

Menurut (Prastowo dan Huda 2011) tanggung jawab sosial atau CSR merupakan mekanisme alami bagi perusahaan untuk "membersihkan" keuntungan besar yang diperolehnya. Sebagaimana diketahui, cara perusahaan memperoleh keuntungan terkadang dapat merugikan pihak lain, baik disengaja maupun tidak. Karena CSR merupakan hasil dari dampak keputusan dan aktivitas perusahaan, hal ini disebut sebagai mekanisme alami, dan tugas perusahaan adalah memperbaiki situasi mereka yang terkena dampaknya. Di PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi, penerapan CSR diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dari aspek sosial budaya maupun lingkungan, sehingga perusahaan harus memenuhi tanggung jawab sosialnya. Perusahaan perlu menyadari bahwa kegiatan CSR dapat memberikan manfaat signifikan bagi bisnisnya. Perusahaan juga berperan dalam mengatasi masalah sosial dan lingkungan yang dapat dimanfaatkan dalam program-program perusahaan. Meskipun PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi telah menjalankan program CSR, dampaknya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat sekitar, karena belum semua program tersebut dapat diimplementasikan dengan efektif.

Dalam melaksanakan program CSR PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi mengusakan secara maksimal untuk efektifitas pelaksanaan CSR yang maksimal. Tetapi hal ini tentunya tidak menutup kemungkinan adanya suatu kendala dalam menjalankan program tertentu. Pada PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi salah satu kendalanya adalah masalah anggaran. Dikarenakan keterbatasan anggaran dana maka bantuan yang diberikan masih terbatas. Selain hal tersebut, dalam program CSR di PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi belum adanya suatu struktur pelaksana CSR, aktivitas CSR hanya dirangkap oleh divisi humas dan KTU. Berbicara mengenai implementasi CSR tentunya sangat berkaitan dengan masyarakat. Dalam mengimplementasikan program CSR harusnya melibatkan pemerintah desa maupun pemuka masyarakat lalu disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui program CSR PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi, hal ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang program CSR. Masyarakat hanya mengetahui bahwa bantuan yang diberikan hanya sebagai sumbangsih dari perusahaan untuk masyarakat sekitar, masyarakat tidak mengetahui bahwa bantuan tersebut bagian dari kewajiban perusahaan yang wajib diberikan kepada masyarakat berbentuk program CSR. Selain itu perda kabupaten mukomuko belum ditetapkan sehingga mekanisme penyaluran diatur internal perusahaan itu sendiri sehingga pengawasan pemerintah terhadap implementasi CSR pun tidak dilakukan. Mekanisme yang diatur internal perusahaan PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi dalam merealisasikan CSR hanya berdasarkan proposal yang masuk saja.

Berdasarkan fenomena diatas, judul ini untuk mengetahui implementasi CSR PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi direalisasikan sesuai dengan aturan yang berlaku? Hal ini bertujuan untuk membuktikan implementasi CSR di PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat di desa lubuk pinang sudah berjalan sesuai dengan semestinya.

METODE

Dalam penelitian ini, digunakan metode deskriptif dan kualitatif. Menurut Sugiyono (2016), metode deskriptif kualitatif berlandaskan filosofi post-positivisme dan ditujukan untuk memeriksa kondisi objek alam (sebagai alternatif dari eksperimen), memungkinkan peneliti melakukan survei dan analisis data secara induktif/kualitatif, dengan hasil yang lebih menekankan pada pemahaman makna ketimbang generalisasi. Penelitian ini dilakukan di Sapta Sentosa Jaya Abadi, dengan informan yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data mencakup tiga langkah: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, serta penggunaan triangulasi sumber untuk verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Implementasi Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT.Sapta Sentosa Jaya Abadi

Pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) merupakan bentuk tanggung jawab sosial yang menunjukkan inisiatif atau aktivitas yang bertujuan untuk mengatasi dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan usaha perusahaan tersebut di wilayah sekitarnya. Berdasarkan hal ini, temuan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Komunikasi

Faktor komunikasi menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada adanya komunikasi yang efektif antara pelaksana program dan kelompok sasaran. Faktor komunikasi dalam hal ini berupa suatu penyampaian informasi yang dilakukan perusahaan mengenai CSR. Dalam aspek komunikasi, ada tiga indikator yang digunakan. Pertama, dimensi transmisi adalah cara informasi disampaikan kepada publik. Dalam hal ini cara informasi disampaikan yaitu sosialisasi berupa mengadakan pertemuan yang melibatkan beberapa pihak. Penjelasan tersebut disampaikan Bapak Eranardi selaku Ketua Humas dan KTU:

“Untuk sosialisasi kita melakukannya setiap setahun sekali, jika pelaksanaan CSR akan dilakukan tahun 2024 maka sosialisasinya tahun 2023 berkisar antara bulan agustus-september karena bulan tersebut proses penyusunan budget perusahaan. sosialisasinya terhadap masyarakat di kantor desa lubuk pinang dan juga kantor wali nagari silaut karena itu adalah ring 1 perusahaan. Sosialisasi ini dilakukan dengan mengundang atau mengumpulkan perangkat desa, tokoh masyarakat bahwa adanya program CSR dari PT sapta sentosa jaya abadi yang akan diterapkan di desa dan nagari sesuai usulan masyarakat desa dan nagari setempat. Sasaran sosialisasi CSR ini pemerintahan desa, pemerintahan nagari, tokoh masyarakat, dan bidang kesehatan. informasi yang disampaikan dalam sosialisasi yang pertama adalah peranan dan tanggung jawab perusahaan melalui program CSR, dalam hal ini tentu ada yang disampaikan program melalui desa dan tidak ada di desa tapi di perusahaan ada, contohnya penyaluran zakat tidak ada di desa tapi ada dari perusahaan.” (Hasil wawancara 29 Mei 2024).”

Indikator yang kedua yaitu dimensi kejelasan informasi. Dalam menyampaikan informasi kepada pihak yang terkait haruslah jelas dan sampai kepada sasaran agar informasi tersebut dapat direalisasikan oleh para pelaksana kebijakan program. Hal ini disampaikan bapak Harafik selaku kepala Desa Lubuk Pinang :

“Informasi disampaikan dengan jelas oleh pihak perusahaan. Tetapi menurut saya tidak semuanya dijelaskan dengan secara detail seperti anggaran biaya yang dikeluarkan untuk realisasi CSR. CSR ini dikeluarkan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dari keuntungan perusahaan ulai dari 2-4%, tetapi dalam sosialisasi informasi ini tidak disampaikan secara terbuka sehingga tidak tahu berapa seharusnya yang dikeluarkan

dengan yang diterima masyarakat.” (Hasil wawancara 29 Mei 2024).

Sedangkan dari indikator ketiga yaitu konsistensi komunikasi. Dalam hal ini sosialisasi dilakukan dengan konsisten oleh PT Sapta Sentosa Jaya Abadi setiap tahunnya dengan aparat desa dan pihak yang bekerja sama didalamnya. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Eranardi selaku Ketua Humas sekaligus Ketua Tata Usaha (KTU) di PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi:

“ Untuk sosialisasi ini konsisten dilakukan setiap satu tahun sekali dengan mengundang mengadakan pertemuan yang difasilitasi oleh aparat desa dan wali nagari di desa penyangga tersebut. dengan mengadakan pertemuan tersebut diharapkan informasi yang disampaikan dipahami dengan jelas oleh aparat desa agar aparat desa tersebut bisa menyampaikan kembali kepada masyarakat mengenai bantuan yang sudah disalurkan oleh perusahaan PT Sapta Sentosa Jaya Abadi ” (Hasil wawancara 29 Mei 2024).

Berdasarkan pernyataan informan diatas dari aspek komunikasi telah dilaksanakan sosialisasi program. Penyampaian informasi ini disampaikan kepada aparat desa dan pihak terkait dalam menyalurkan realisasi CSR ini. Lalu aparat desa menyampaikan kepada masyarakat melalui MusDes. Tetapi hal ini tidak diampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui apa itu CSR. Kemudian menurut aparat desa informasi ini belum disampaikan secara rinci mengenai anggaran dari pihak perusahaan yang dibagikan untuk masyarakat supaya adanya kejelasan. Sedangkan untuk konsistensi bahwa sosialisasi setahun sekali dengan mengadakan pertemuan yang di fasilitasi oleh pemerintah desa yang melibatkan beberapa pihak yaitu pemerintahan desa, pemerintahan nagari, tokoh masyarakat, dan bidang kesehatan, dengan mengadakan sosialisasi bersama para pihak terkait nantinya akan membantu proses penyaluran pelaksanaan CSR kepada masyarakat.

B. Sumberdaya

Komponen sumber daya mengharuskan setiap kebijakan untuk didukung oleh sumber daya yang cukup, baik dalam bentuk sumber daya manusia sampai fasilitas yang digunakan untuk mendukung keberhasilan CSR. Ada empat indikator dalam aspek sumber daya. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Mengenai hal ini, Bapak Eranardi, Ketua Humas dan Ketua Tata Usaha (KTU) di PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi, menjelaskan bahwa:

“Yang melaksanakan CSR adalah petugas dari CSR itu sendiri adanya tim yang terdiri dari manajemen yang diwakili oleh manajer, KT dalam hal penyalurannya nanti juga ada instansi pemerintah untuk menyaksikan tentang benar adanya bantuan yang disalurkan. Sumber daya manusia dalam pelaksana CSR ini ada sebanyak 5 orang yang terdiri dari manajer, KTU, humas, security dan supir yang saling berkaitan satu sama lain. Tentunya petugas pelaksana CSR memiliki kemampuan yang cukup dan kompeten.” (hasil wawancara 29 mei 2024).

Indikator yang kedua yaitu informasi. Informasi dalam sumberdaya adalah informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Mengenai hal tersebut disampaikan Bapak Eranardi selaku Ketua Humas sekaligus Ketua Tata Usaha (KTU) di PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi, beliau menyampaikan bahwa:

“yang pertama yang dilakukan adalah identifikasi,dalam hal ini apa yang diperlukan oleh masyarakat dididentifikasi dulu.setelah diidentifikasi baru kita sinkronkan dengan program pemerintah,bertentangan gak dengan program pemerintah.sudah diberi belum oleh pemerintah atau desa nya.kalau sudah diberikan oleh pemerintah dan desa kita tidak bisa masuk karena tumpang tindih dan manfaatnya tidak tercapai secara maksimal nantinya.nah setelah itu barulah kita masukkan ke prioritasnya,apa sih prioritas kita setelah identifikasi masalah tadi,misalnya memberikan santunan yatim piatu,misalnya pemberian minyak goreng atau alat kesenian baju seragam,nah itu sesuai dengan kebutuhannya juga.kemudian baru masukkan ke program kita,berapa budgetnya,dana yang dibutuhkan.baru dimasukkan ke program perusahaan,nanti begitu mereka ada mengusulkan lagi.”(Hasil Wawancara 29 Mei 2024).

Indikator yang ketiga yaitu wewenang. Dalam hal ini yang menjadi wewenang pada peraturan program CSR PT.Sapta Sentosa Jaya Abadi yaitu peraturan daerah yang seharusnya mengatur dan mengawasi jalannya pelaksanaan CSR. Hal ini dijelaskan oleh bapak ipal selaku tokoh masyarakat (kepala dusun 2 lubuk pinang) beliau menjelaskan bahwa:

“yang berwenang yang mengatur untuk CSR itu tentunya peraturan daerah. Tetapi saat sekarang kalo tidak salah belum ada perda yang disahkan karena yang lama sudah dibatalkan. Mekanismenya karena perda di daerah mukomuko belum ada yng berlaku dengan sah,makanya mekanisme penyaluran diatur perusahaan itu sendiri tanpa adanya pengawasan.” (hasil wawancara 30 mei 2024).

Indikator yang keempat yaitu Fasilitas (sarana dan prasarana). Sarana dan prasarana dalam implementasi program CSR PT.Sapta Sentosa Jaya Abadi dapat berupa suatu alat atau transportasi yang diperlukan dalam melaksanakan implementasi CSR ini. penyediaan fasilitas yang memadai akan membantu keberhasilan implementasi program dan kebijakan. Serta dalam hal fasilitas juga termasuk sumberdaya finansial yang berupa anggaran yang disediakan untuk CSR. Dalam hal ini dijelaskan oleh Bapak Eranardi selaku Ketua Bidang Humas sekaligus Ketua Tata Usaha (KTU) di PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi,beliau mengatakan bahwa:

“Kalau sarana sih kita banyak ke arah transportasi aja sih,sarana itu kan untuk menuju kesana, prasarana itu kan apa yang kita berikan apa yang ada di program dan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kalau untuk kelengkapan itu sudah baik, tetapi perlu juga ditingkatkan lagi. Namanya kita menganggap baik kan belum sempurna,untuk menuju sempurna itu perlu ada tingkatan lagi. sarana dan prasarana perlu ditingkatkan misalnya sarana nya tadi,kita butuh 2,3 atau 4 sarana ya kan ini ada 1, nah itu yang perlu ditingkatkan.”(Hasil Wawancara 29 Mei 2024).

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa dalam aspek sumber daya yang terdiri dari empat indikator saling keterkaitan satu sama lain. Pada dimensi pertama yaitu staff sudah adanya sebuah tim yang terdiri dari 5 orang yaitu ada manajer, KTU, humas, security dan supir yang saling berkaitan satu sama lain yang mempunyai kemampuan yang cukup. Sedangkan pada dimensi informasi dilihat dari informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Selanjutnya dimensi wewenang yaitu pelaksanaan CSR untuk saat sekarang belum ada perda yang mengatur dan mengawasi jalannya CSR, dikarenakan belum adanya perda yang berlaku dengan sah, makanya Mekanisme pelaksanaan CSR hanya diatur oleh internal perusahaan itu sendiri. Dimensi terakhir dalam aspek sumberdaya yaitu fasilitas (sarana dan prasarana), sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan CSR ini sudah cukup baik namun perlu adanya tingkatan lagi untuk perusahaan realisasikan mengusahakan agar tetap optimal.

C. Disposisi

Pada aspek disposisi yaitu menunjuk karakteristik yang berkaitan erat dengan implementor kebijakan atau program. Pada aspek disposisi terdapat dua indikator. Indikator yang pertama yaitu Komitmen. Komitmen dalam implementasi program CSR PT.Sapta Sentosa Jaya Abadi ini yaitu kesungguhan dari para pelaksana CSR dalam mengimplementasikan CSR. Hal ini juga dapat berupa pelibatan semua stakeholder yang ada. Serta melalui rentetan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk merealisasikan CSR. Setelah realisasi CSR adanya suatu pelaporan CSR dan berita acara. Hal ini disampaikan oleh bapak Bapak Eranardi selaku Ketua Bidang Humas sekaligus Ketua Tata Usaha (KTU) di PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi beliau mengatakan bahwa:

“Kesungguhannya kita dalam penyalurannya kita akan melibatkan semua stakeholder yang ada. Stakeholdernya misalkan dari perusahaannya ada,dari pemerintahan ada yang menyaksikan dan setelah itu nantinya ada berita acara setelah memberikan bantuan,kalau tidak buat berita acara seolah-olah yang kita berikan tidak ada bukti. Di dalam berita acara tersebut adanya seperti pelaporan tanggalnya, disaksikan oleh siapa, yang memberikan dan yang menerima bantuannya.”(hasil wawancara 29 mei 2024).

Selanjutnya mengenai komitmen peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu desi

mayasari selaku di bidang ISO&LH sebagai mencatat pelaporan CSR PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi, beliau mengatakan bahwa:

“ISO itu terkait kelayakan produksi yang kita hasilkan dan kalo lingkungan hidup itu terkait di pelaporan tentang CSR perkembangan usaha perusahaan yang dikelola, lalu nanti diinput tentang CSR yang sudah dilakukan. Ibu disini membuat laporannya dapat juga berupa berita acara bahwa CSR telah dilaksanakan tanggal sekian, terus apa aja yang sudah dibantu apa aja yang diberikan bantuan apa saja yang sudah diberikan kepada masyarakat tersebut.” (Hasil Wawancara 29 Mei 2024).

Indikator yang kedua yaitu Kejujuran. Watak yang dimiliki para pelaksana dilihat dari keterbukaan para pelaksana mengenai program CSR kepada pemerintah desa maupun masyarakat. Dalam Implementasi CSR juga diperlukannya kejujuran baik pelaksana CSR maupun seluruh pegawai di pihak PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi, hal ini juga dilihat dari keterbukaan pihak pelaksana dalam menjalankan suatu program CSR dan terbuka kepada sesama masyarakat di sekitarnya yang terkena dampak negatif dari berdirinya perusahaan ini. Hal ini disampaikan oleh Bapak Harafik selaku Kepala Desa Lubuk Pinang, beliau mengatakan bahwa:

“Menurut saya kalau keterbukaan belum secara detail dilakukan apalagi terkait dengan anggaran yang dikeluarkan untuk program CSR ini, seharusnya dikatakan bahwa adanya suatu program yang akan dilaksanakan melalui rencana kerja program CSR lalu direalisasikan dengan budget sekian agar terlihat dan terbuka supaya tidak terjadi kesalahpahaman”. (Hasil wawancara 29 Mei 2024).

Lalu pernyataan senada oleh pernyataan bersama Ibu Ulmawati selaku masyarakat sekitar, beliau menyampaikan bahwa :

“Tidak ada keterbukaan di PT ini, malahan lebih banyak dampak negatif yang kami rasakan daripada dampak positifnya, kami lebih banyak di iming-iming dengan janji saja namun tidak ada. Dulu pernah dijanjikan untuk penerangan jalan dan air bersih sudah lama tidak ada bantuan itu akhirnya adanya protes ke pihak PT, memang adanya bantuan tersebut setelah protes tapi hanya terbatas cuma 5 orang saja yang dapat. Dulu juga pernah terjadi kebocoran limbah PT 2 kali kalo tidak salah yang membuat ikan-ikan mati di sungai. Tetapi ada juga bantuan yang kami rasakan disini seperti bus sekolah anak dari PT yang ngantar dan jemput anak sekolah, lalu juga ketika hari lebaran nanti adanya THR seperti sajadah atau sarung atau marjan.” (hasil wawancara 31 Mei 2024).

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam aspek disposisi terdiri dari dua indikator yang pertama indikator komitmen yaitu kesungguhan para pelaksana dalam menjalankan CSR di sudah cukup baik dilihat dari kesungguhannya dalam penyalurannya yang melibatkan semua stakeholder yang ada, serta dalam merealisasikan CSR melalui beberapa rentetan langkah yang harus dilakukan dan diakhiri dengan adanya pelaporan berupa berita acara. Dimensi kedua yaitu keterbukaan kejujuran pelaksana implementasi CSR PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi dapat dilihat bahwa memang adanya pelaksanaan tetapi dari beberapa pihak hal ini belum terlalu terbuka terlebih lagi mengenai anggaran dan kepada masyarakat. Dalam hal ini PT. juga belum merangkul masyarakat dengan baik sehingga belum adanya keterbukaan kepada masyarakat sekitar.

D. Struktur birokrasi

Aspek struktur birokrasi mengacu pada struktur dan mekanisme pelaksanaan program CSR. Ada dua indikator aspek struktur birokrasi. Yang pertama adalah prosedur operasi standar (SOP). Hal ini menyatakan bahwa SOP yang baik mencakup kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak rumit, dan mudah dipahami yang memandu kerja para pelaksana/penegak kebijakan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Eranardi selaku Ketua Bidang Humas sekaligus Ketua Tata Usaha (KTU) di PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi beliau mengatakan bahwa:

“Standar Operating Procedurenya itu yang pertama CSR itu adalah kewajiban perusahaan, yang kedua dalam hal penyalurannya harus berdasarkan permohonan atau proposal dari desa atau organisasi, lalu kita melakukan evaluasi untuk kelayakan

mendapatkan bantuan, lalu kita lakukan penyaluran bantuan yang disaksikan oleh pemerintah desa dan kita juga berusaha memaksimalkan SOP yang sudah ada.”(hasil wawancara 29 mei 2024).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Harafik selaku Kepala Desa Lubuk Pinang, beliau mengatakan bahwa:

“Memang sudah cukup baik, tetapi mereka menyalurkan CSR itu berdasarkan proposal yang masuk saja, seharusnya kan tidak menunggu proposal yang masuk tetapi wajib dikeluarkan sesuai dengan keuntungan perusahaan, itu masalahnya bukan tunggu proposal masuk seharusnya sudah diberikan ke desa penyangga.kalau kita ngajukan proposal di kasihnya.kalo tanpa ajuan proposal dulu mungkin awal awal iya,kalau tanpa proposal jarang,tapi kalau zakat itu kan beda lagi harusnya kan bukan bagian dari CSR.mungkin ya itu lah bentuk CSR nya itu ajuan dari masyarakat kelompok dan desa.serang mengajukan proposal ke perusahaan itu,mungkin itulah bentuk CSR nya. proposal yang diajukan nantinya akan tunggu sekitar seminggu untuk di acc.menurut saya sudah membantu masyarakat tetapi belum signifikan.kalau sesuai undang undang sangat jauh lah.”(Hasil Wawancara 29 Mei 2024).

Indikator yang kedua yaitu Struktur organisasi,Struktur organisasi CSR adalah kerangka yang menggambarkan bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan diorganisasikan dan diimplementasikan dalam suatu perusahaan. Struktur ini bervariasi tergantung pada ukuran, industri, dan kebutuhan spesifik perusahaan.seperti yang dijelaskan oleh Bapak Eranardi selaku Ketua Bidang Humas sekaligus Ketua Tata Usaha (KTU) di PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi, beliau menyampaikan bahwa:

“Sebenarnya setiap perusahaan itu kan harus mempunyai struktur organisasi dan juga yang menangani CSR itu kan memang harus ada sertifikasinya,kalau di kami kan belum ada tim yang khusus untuk menangani CSR, itu hanya dirangkap oleh KTU, manajer, humas, driver, security yang penting kita bersama-sama.kalau secara strukturnya kita belum tapi berdasarkan peraturan itu wajib harus memiliki tenaga yang memang menangani CSR dan orangnya harus sertifikasi untuk CSRnya dan kita saling bekerja sama satu sama lain.(Hasil Wawancara 29 Mei 2024).

Berdasarkan pernyataan informan diatas dari aspek struktur birokrasi yang pertama yaitu dimensi *Standar Operating Procedure* (SOP), dapat dilihat bahwa adanya SOP (*Standar Operating Procedure*) dalam implementasi CSR PT sapta sentosa jaya abadi sistem rentetan mekanisme penyaluran CSR berdasarkan proposal yang diajukan ke perusahaan PT.Sapta Sentosa Jaya Abadi, jika tidak ada ajuan maka perusahaan juga tidak memberikan penyaluran CSR. Dikarenakan Perda di daerah Mukomuko belum ada yang berlaku dengan sah, makanya mekanisme penyaluran diatur internal perusahaan itu sendiri. Bisa menunggu usulan proposal bisa program sosial dari perusahaan itu sendiri. Sedangkan indikator Struktur organisasi pelaksana CSR dapat disimpulkan bahwa belum adanya tim pelaksana CSR tetapi belum ada divisi khusus yang menangani CSR , pelaksana CSR hanya bagian dari pegawai PT Sapta sentosa jaya abadi itu sendiri. Aktivitas CSR masih dirangkap oleh divisi Hubungan Masyarakat (Humas) atau Human Resources Development (HRD). Hal itu tentu saja menjadi pengaruh terhadap aktivitas CSR karena tanpa adanya SDM yang keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya maka akan berpengaruh terhadap keberhasilan CSR.Aktivitas CSR ini hanya masih dirangkap oleh divisi Hubungan Masyarakat (Humas) dan bagian dari pegawai PT itu saja.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi

a. Faktor pendukung

1. Dukungan dari pihak lain

Program CSR ini memang program kebijakan perusahaan, tetapi partisipasi dari pihak lain juga menjadi pendukung demi keberhasilan program kebijakan CSR. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Eranardi selaku Ketua Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) sekaligus Ketua Tata Usaha (KTU) di PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi, beliau menjelaskan bahwa:

“Adanya dukungan pemerintah seperti motivasi dan difasilitasi tempat ketika ingin mengadakan sosialisasi itu disediakan oleh pemerintah desa contohnya di aula lubuk pinang ketika ada pertemuan zakat ketika adanya pertemuan go publik itu disaksikan oleh gubernur, bupati, camat, desa, kapolres, kua sampai di tingkat desa, itulah bentuk-bentuk dukungannya. Jika ada korban bencana itu kita tidak adanya proposal langsung turun asal mendapat informasi dari kepala desa, perusahaan akan inisiatif untuk turun langsung kan urgent. tetap adanya pemerintah desa, kecamatan tetap ada, babinsa ada, kenapa harus ada karena kita kan bersama-sama untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, barangnya dari perusahaan tapi yang menyerahkan itu pemerintah.” (Hasil wawancara 29 Mei 2024).

Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan bahwa partisipasi dalam implementasi CSR PT Sapta Sentosa Jaya Abadi melibatkan stakeholder yang terlibat seperti pemerintah desa, kepala dusun, tokoh masyarakat bahkan pihak lainnya. partisipasi dari pihak lain ini bisa datang dari mana saja seperti partisipasi pemerintah desa yang memfasilitasi kantor untuk melakukan pertemuan, serta turunnya tokoh masyarakat dan aparat desa ke lapangan secara langsung untuk melakukan realisasi CSR.

2. Tenaga kerja dominan masyarakat desa

Tenaga kerja dominan masyarakat desa mengacu pada kondisi di mana mayoritas tenaga kerja dalam suatu desa berasal dari masyarakat setempat. Dominasi pekerja lokal ini memiliki dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian desa, karena pendapatan yang dihasilkan cenderung beredar di dalam komunitas tersebut, meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi lokal. Hal ini disampaikan oleh Bapak Eranardi selaku Ketua Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) sekaligus Ketua Tata Usaha (KTU) di PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi, beliau menjelaskan bahwa:

“Dengan adanya perusahaan disini merasakan keberadaannya itu dirasakan oleh masyarakat lingkungan, apalagi tentang tenaga kerja, tenaga kerja ini kan termasuk sosial juga, tenaga kerja kita ambil dominan banyak orang putra daerah sehingga orang yang tidak memiliki pekerjaan mempunyai pekerjaan.” (hasil wawancara 29 Mei 2024).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pekerja yang dominan berasal dari masyarakat desa menunjukkan peran penting yang dimainkan oleh komunitas lokal dalam sektor pekerjaan tertentu, terutama di daerah pedesaan. Keterlibatan masyarakat desa dalam tenaga kerja memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat. perusahaan ini dapat memberikan kesempatan pekerjaan.

b. Faktor penghambat

1. Anggaran

Pada implementasi CSR PT Sapta Sentosa Jaya Abadi kendala yang dihadapi salah satunya yaitu kurangnya anggaran sehingga bantuan yang diberikan pun masih terbatas. Bantuan yang diberikan belum sepenuhnya terpenuhi karena kurangnya anggaran. Hal ini disampaikan oleh Bapak Eranardi selaku ketua humas dan KTU beliau menyampaikan bahwa:

“Kendalanya yaitu perusahaan tidak bisa memenuhi keseluruhan proposal yang diajukan kepada pihak perusahaan karena keterbatasan anggaran itu tadi. Karena perusahaan tidak mempunyai anggaran sepenuhnya terhadap proposal ini pengajuan, karena akan terus ada yang mengusulkan jadi dana itulah yang kita berikan, misalkan kita kasih ini 100 juta sementara orang lubuk pinang ranah karya tidak kita kasih. Kendalanya adalah perusahaan tidak bisa memenuhi sesuai dengan apa yang diminta masyarakat itu.” (Hasil Wawancara 29 Mei 2024).

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran menjadi salah satu faktor belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini mengurangi efektivitas dan dampak jangka panjang dari program-program bantuan atau CSR.

2. Belum adanya susunan kerja yang tetap

Dalam Implementasi CSR perlunya susunan kerja CSR yang tetap setiap tahunnya, agar dapat direalisasikan dengan baik. Tetapi dalam hal ini belum adanya susunan kerja yang tetap, hal ini dapat dilihat bahwa dana yang direalisasikan untuk CSR tidak ditetapkan hanya berdasarkan ajuan proposal yang masuk saja. Seperti wawancara yang dilakukan oleh peneliti Dengan bapak harafik selaku kepala desa lubuk pinang, beliau mengatakan bahwa :

“..programnya sebagian tepat, Gimana ya jumlah dana CSR yang disalurkan itu, saya juga tidak mengerti gimana, entah itu melalui kabupaten ntah bagaimana, ya itulah kalau ada masuk proposal ya dibantu. dalam tahun ini seperti itu ntah kemungkinan itu bentuk CSR nya, kami mengajukan proposal, dan dibantu semen, mungkin itu lah bentuk CSR nya, sering ngajukan proposal disitu untuk acara karang taruna kalau diajukan tetap dikasih, acara 17 tetap di kasih, mungkin seperti itu saja bentuk CSR mereka salurkan mungkin. Dana nya pun tidak ditargetkan, gatau juga sistimnya seperti apa, harusnya berapa persen dari keuntungan tersebut berapa untuk disalurkan sebagai CSR, kalau saya baca-baca aturannya itu menurut undang-undangnya seperti itu sih tapi kenyataannya...” (hasil wawancara 29 mei 2024).

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa belum adanya susunan program kerja dengan baik, hal ini dapat dilihat belum adanya susunan program yang benar-benar terprogram dengan baik. Hal ini dilihat bahwa program yang dijalankan hanya berdasarkan ajuan proposal yang masuk ke perusahaan itu saja.

3. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai CSR

Ketidaktahuan ini juga dapat menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan terhadap niat baik perusahaan, sehingga masyarakat mungkin melihat program CSR sebagai upaya pencitraan semata atau bahkan menganggapnya tidak relevan dengan kebutuhan mereka. Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat yang berada pada sekitar perusahaan tersebut, hal ini disampaikan oleh ibuk Ulmawati, beliau menyampaikan bahwa:

“CSR itu apa saya tidak tahu apa itu CSR, saya tinggal di sekitar perusahaan tetapi saya tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari aparat desa ataupun dari PT ini, tidak tahu itu. memang ada bantuan yang diberikan seperti zakat, dan kebetulan suami saya kerja disana dan palingan dapat THR. Selama saya tinggal disini saya tidak pernah dapat sosialisasi semacam itu, tetapi kalau bantuan ya ada.” (Hasil wawancara 31 Mei 2024).

Untuk kejelasan informasi yang sebelumnya disampaikan oleh masyarakat dan pemerintah desa, lalu peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat lainnya dengan ibuk Ida mengatakan bahwa:

“Kalau ada hari besar seperti lebaran ada bingkisan yang diberikan seperti sirup marjan atau sajadah atau sarung itu saya dapat dan mungkin warga sekitar sini dapat semuanya. Tetapi itu kan bantuan THR dari PT ini berupa bantuan yang diberikan kepada masyarakat disini”. (Hasil wawancara 31 Mei 2024).

Berdasarkan pendapat diatas, tidak semua warga mengetahui tentang CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan tersebut. Sehingga tidak sedikit masyarakat yang kebingungan ketika mendengar kata CSR tersebut. Masyarakat menganggap bahwa yang diberikan oleh pihak PT tersebut hanya sebagai bantuan bukan sebagai hak yang memang harus diterima masyarakat apalagi yang berada di sekitar perusahaan PT Sapta Sentosa Jaya Abadi yang merasakan langsung baik buruknya dari berdirinya PT tersebut. Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan tidak mendapat informasi pengetahuan mengenai CSR.

4. Belum Adanya Tim Yang Khusus Untuk Menangani CSR

Dalam implementasi CSR di PT.Sapta Sentosa Jaya Abadi belum adanya tim khusus yang menangani CSR ini.pelaksana CSR hanya dirangkap oleh divisi humas dan ktu dan dari pegawai PT itu sendiri.seperti yang dijelaskan oleh Bapak Eranardi Selaku Ketua Humas Dan KTU PT.Sapta Sentosa Jaya Abadi,beliau menjelaskan bahwa:

“Sebenarnya setiap perusahaan itu kan harus mempunyai struktur organisasi dan juga yang menangani CSR itu kan emang harus ada sertifikasinya,kalau di kami kan belum ada tim yang khusus untuk menangani CSR, itu hanya dirangkap oleh KTU, manajer, humas, driver, security yang penting kita bersama-sama.kalau secara strukturnya kita belum tapi berdasarkan peraturan itu wajib harus memiliki tenaga yang memang menangani CSR dan orangnya harus sertifikasi untuk CSRnya dan kita saling bekerja sama satu sama lain.(hasil wawancara 29 mei 2024).

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa belum adanya divisi khusus yang menangani CSR, implementasi CSR masih dirangkap oleh divisi Hubungan Masyarakat (Humas) dan dari pegawai perusahaan tersebut.

Pembahasan

1. Implementasi Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT.Sapta Sentosa Jaya Abadi

Pembahasan temuan penelitian ini disajikan sesuai dengan rumusan pertanyaan penelitian, yang disesuaikan dengan teori implementasi kebijakan yang diuraikan oleh George C. Edward III.

A. Komunikasi

Pada aspek komunikasi terdapat tiga indikator yang digunakan. Pertama cara informasi disampaikan kepada publik berupa sosialisasi dengan mengadakan pertemuan Berdasarkan hasil penelitian bahwa, cara yang dilakukan berupa pertemuan yang dilakukan oleh pihak PT.Sapta Sentosa Jaya Abadi dengan melibatkan beberapa pihak seperti aparat desa,kepala dusun,tokoh masyarakat,dan koordinasi di berbagai bidang tentang implementasi CSR mengenai bantuan yang disalurkan kepada masyarakat. Dengan adanya sosialisasi berupa pertemuan di kantor desa tersebut, pihak PT.Sapta Sentosa Jaya Abadi yang melibatkan aparat desa dan pihak lainnya lalu pemerintah desa tersebut seharusnya menyampaikan kembali kepada masyarakat bahwa adanya suatu program wajib yang dimiliki PT.Sapta Sentosa Jaya Abadi agar masyarakat dapat mengetahui bantuan yang diberikan perusahaan tersebut. Menurut pendapat George C. Edwards III (seperti diungkapkan oleh Leo Agustino, 2020), pemerataan komunikasi yang efektif dapat menghasilkan pelaksanaan kebijakan yang baik. Namun, sering terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi dalam proses komunikasi, terutama karena komunikasi melewati berbagai tingkat birokrasi, yang dapat menyebabkan distorsi. Di sisi lain, George C. Edwards (seperti dijelaskan oleh Widodo, 2010) menyatakan bahwa komunikasi kebijakan publik harus dilakukan secara langsung atau tidak langsung tidak hanya kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga kepada masyarakat umum dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam hal ini interaksi melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan pelaksanaan CSR di kantor desa dapat memberikan dampak positif. Aparat desa dan pemangku kepentingan memahami bahwa akan dilakukan konsultasi terkait penyaluran CSR dan akan memastikan program pelaksanaan CSR ini terlaksana dengan baik dan efektif. Dalam hal ini indikator transmisi dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi melalui pertemuan di kantor desa atau tempat lainnya yang dilakukan setahun sekali dinilai tepat.

Indikator kedua yaitu kejelasan informasi Berdasarkan hasil temuan dilapangan ditemukan bahwa indikator kejelasan dalam aspek komunikasi belum dijelaskan artinya belum berjalan maksimal, dikarenakan bahwa adanya beberapa aparat desa yang menyebutkan bahwa belum adanya kejelasan secara rinci tentang dana dan program yang dimiliki,dan juga dalam hal ini tidak sedikit masyarakat yang belum memahami bahkan tidak mengetahui apa itu CSR. Mengingat dalam pelaksanaan kebijakan program CSR PT sapta sentosa jaya abadi ini diharapkan dapat menjalin

kerjasama yang baik dengan aparat desa serta kepada masyarakat agar informasi yang belum diketahui dapat benar-benar tersampaikan. Menurut pendapat kebijakan George C. Edward III (Dalam Leo Agustino, 2020) komunikasi yang diterima oleh para praktisi politik (birokrat tingkat rendah) harus jelas dan tidak membingungkan (unambiguous). Meskipun pesan-pesan politik yang tidak jelas tidak serta merta menghalangi implementasi pada tingkat tertentu, para pelaksana kebijakan memerlukan informasi yang jelas ketika menerapkan kebijakan agar dapat mencapai tujuan yang harus dicapai tergantung pada isi kebijakan yang akan dilakukan. Sedangkan Menurut George C. Edward III (Widodo, 2010), dimensi kejelasan adalah ketika suatu kebijakan dikomunikasikan dengan jelas kepada pelaksana, kelompok sasaran, dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga memperjelas apa tujuan, sasaran, dan konten yang diperlukan dapat dimengerti. Serta memberikan informasi dari kebijakan publik agar setiap orang mengetahui apa yang perlu dipersiapkan dan dilaksanakan agar dapat mencapai keberhasilan kebijakan secara efektif dan efisien. Dalam indikator kejelasan belum dapat dikatakan efektif karena dari pihak pemerintah desa menyebutkan bahwa tidak adanya rincian biaya dengan jelas yang disampaikan melalui sosialisasi tersebut. Seharusnya dalam menyampaikan informasi mengenai anggaran dan juga rencana kerja yang telah dimiliki oleh pihak perusahaan melalui sosialisasi haruslah jelas dan dimengerti oleh beberapa pihak supaya tidak terjadi kesalahpahaman.

Indikator ketiga yaitu konsistensi Berdasarkan temuan yang diteliti dilapangan, terlihat bahwa konsistensi dalam implementasi program CSR PT.Sapta Sentosa Jaya Abadi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa lubuk pinang konsisten dilakukan, hal ini dapat dilihat dari adanya pemaparan informasi mengenai sosialisasi yang dilakukan tentang implementasi CSR PT.Sapta Sentosa Jaya Abadi. Peneliti mengamati dapat dikatakan sudah cukup konsisten karena melalui informasi informan terkait bahwasanya sosialisasi dilakukan setiap satu kali dalam setahun. Seperti yang diungkapkan oleh George C. Edward III (Leo Agustino, 2020), agar suatu kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif, maka perintah (yang akan dilaksanakan atau dilaksanakan) harus konsisten dan jelas menyatakan tidak akan dilaksanakan. Petunjuk yang diberikan dalam melaksanakan kebijakan harus konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dilaksanakan). Hal ini dikarenakan pelaksana perintah di lapangan bisa menjadi bingung jika perintah yang diberikan sering berubah. Sedangkan menurut George C. Edwards (Widodo, 2010) Perspektif konsistensi diperlukan untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan para pelaksana kebijakan, kelompok sasaran, dan pemangku kepentingan. pada indikator konsistensi pada implementasi program CSR PT.Sapta Sentosa Jaya Abadi sudah cukup baik dan konsisten dilakukan, hal ini terlihat dari sosialisasi yang dilakukan setiap tahunnya di kantor desa bersama beberapa pihak yang terlibat didalamnya. Pemerintah desa juga mengharapkan bahwa sosialisasi ini akan terus konsisten dilakukan demi kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut konsistensi juga berkenaan dengan informasi yang disampaikan konsistiten atau tidak berubah dengan apa yang disosialisasikan. Hal ini terlihat bahwa konsisten dilakukan dan sesuai dengan apa yang disampaikan.

B. Sumber Daya

Pada aspek sumber daya, terdapat empat indikator yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Yang pertama adalah sumber daya manusia (staf). Berdasarkan temuan yang diteliti dilapangan, terlihat bahwa memang adanya suatu tim yang membentuk dan bekerja sama sebagai pelaksana implementasi CSR, tetapi para pelaksana kebijakan program CSR ini hanya bagian dari pegawai saja dalam artian belum ada divisi khusus yang menangani CSR, implementasi CSR hanya dirangkap oleh divisi humas dan lainnya. Jika dilihat dari kemampuan para pelaksana CSR sudah cukup baik, tetapi memang belum adanya struktur yang membentuk tim khusus untuk menangani program CSR, para SDM hanya dirangkap oleh bagian pegawai dari PT sapta sentosa jaya abadi itu sendiri. Menurut George C. Edwards III (Leo Agustino, 2020), kunci utama dalam pelaksanaan kebijakan adalah sumber daya manusia (SDM). Kesalahan dalam implementasi kebijakan seringkali disebabkan oleh kekurangan staf, ketidakcukupan, atau kurangnya

kompetensi di bidangnya. Menambah jumlah staf tidaklah cukup; penting juga memiliki staf dengan keterampilan dan kompetensi yang memadai untuk melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas yang ditetapkan oleh kebijakan tersebut. indikator sumber daya manusia PT.Sapta Sentosa Jaya Abadi sudah cukup baik, hal ini dilihat dari adanya suatu tim yang walaupun belum ada nya divisi khusus yang membentuk struktur CSR dengan jelas mengenai penanganan CSR di PT.Sapta Sentosa Jaya Abadi tetapi tetap bekerja sama dalam merealisasikan CSR.

Indikator kedua yaitu informasi Informasi dalam sumberdaya adalah berkaitan dengan informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan Implementor harus mengetahui apa yang mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Jika informasi dilaksanakan dengan baik maka akan terciptanya suatu implementasi yang efektif. Informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dalam implementasi CSR menggambarkan mengenai pelaksanaan CSR PT.Sapta Sentosa Jaya Abadi. Berdasarkan temuan penelitian dapat dinyatakan bahwa informasi dalam sumberdaya yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dapat dilihat dari rentetan langkah-langkah mulai dari identifikasi sampai kepada realisasi program. Kemudian Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Dalam hal ini pemerintah desa diberi perintah dan tugas untuk menyampaikan kembali kepada masyarakat mengenai implementasi CSR PT.Sapta Sentosa Jaya Abadi melalui musdes agar dalam pertemuan tersebut pemerintah desa bisa mengidentifikasi kebutuhan masyarakat sehingga bisa disampaikan lagi kepada perusahaan, tetapi hal ini tidak disampaikan melalui MusDes sehingga tidak jarang masyarakat yang belum mengetahui program CSR PT.Sapta Sentosa Jaya Abadi. Berdasarkan pandangan Edward III yang dikutip oleh Leo Agustino (2020), dalam penerapan kebijakan, informasi dapat dibagi menjadi dua jenis: (i) Informasi yang terkait langsung dengan pelaksanaan kebijakan, di mana para pelaksana perlu memahami tindakan apa yang harus mereka ambil ketika diminta untuk bertindak. (ii) Informasi mengenai kepatuhan pelaksana terhadap aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, di mana para pelaksana perlu mengetahui apakah pihak lain yang terlibat dalam penerapan kebijakan mematuhi hukum.

Indikator ketiga adalah wewenang berupa kewenangan untuk mengatur program yang dilaksanakan. Berdasarkan temuan penelitian di daerah tersebut, terlihat bahwa Kabupaten Mukomko telah mempunyai peraturan sebelumnya mengenai CSR, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Mukomko Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Namun peraturan daerah termasuk salah satu Peraturan Daerah yang dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri sehingga tidak dapat dilaksanakan. Dan pada saat sekarang, belum adanya perda yang berlaku dengan sah. Oleh karena tidak adanya perda yang berlaku dengan sah, makanya mekanisme peraturan realiasi CSR hanya diatur internal perusahaan itu sendiri. Berdasarkan ungkapan Edward III. (Leo Agustino, 2020) menyatakan bahwa agar perintah dapat terlaksana, wewenang pada umumnya harus bersifat formal. Wewenang adalah kewenangan atau legitimasi seorang pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditentukan secara politik. Jika kewenangan ini nihil, maka kewenangan pelaksana tidak dapat dibenarkan di mata masyarakat dan dapat menghambat proses implementasi kebijakan. Seharusnya terdapat kewenangan perda yang mengatur CSR untuk mengawasi jalannya CSR di setiak kecamatan perusahaan yang ada.

Indikator keempat yaitu fasilitas (sarana dan prasarana). terlihat bahwa fasilitas (sarana dan prasarana dalam implementasi lebih banyak ke arah transportasi yang digunakan untuk menuju ke tempat lokasi bantuan CSR disalurkan, sedangkan prasarana lebih ke arah bantuan yang akan disalurkan dan yang diberikan sesuai yang ada di program yang menjadi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu sarana dan prasarana nya cukup baik tetapi perlu adanya peningkatan lagi. Oleh karena itu sarana dan prasarana nya cukup baik tetapi perlu adanya peningkatan lagi. Menurut Edward III (dalam Leo Agustino, 2020), fasilitas fisik merupakan elemen krusial dalam pelaksanaan kebijakan. Meskipun pelaksana memiliki staf yang memadai, memahami tugas mereka, dan memiliki wewenang, tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai, implementasi kebijakan

tidak akan berjalan dengan efektif. Dalam hal ini fasilitas sarana dan prasarana sudah cukup baik tetapi seharusnya memang adanya peningkatan lagi supaya memadai untuk merealisasikan CSR.

C. Disposisi

Pada aspek disposisi terdapat dua indikator. Pertama yaitu komitmen adalah kesungguhan para pelaksana dalam melaksanakan CSR. Berdasarkan data hasil penelitian bahwa komitmen atau kesungguhan para pelaksana CSR dalam implementasi CSR PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini dapat dilihat dari adanya suatu komitmen pelaksanaan CSR dimulai dari pelibatan seluruh stakeholder yang ada. Komitmen tersebut juga dapat dilihat dari penetapan kelompok sasaran. Serta ada laporan CSR setiap realisasi CSR yang telah dilaksanakan berupa laporan dan dapat juga berupa berita acara. Di PT Sapta Sentosa Jaya Abadi, komitmen terhadap tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan masyarakat. Komitmen CSR perusahaan bertujuan untuk membangun hubungan yang sinergis dan harmonis dengan pemangku kepentingan dan masyarakat, guna mendukung perkembangan serta menciptakan masyarakat yang seimbang, mandiri, dan selaras dengan pertumbuhan usaha perusahaan. Menurut teori Edward III yang dikemukakan oleh Nugroho (2009), untuk melaksanakan suatu kebijakan dengan efektif, para pelaksana atau penegak kebijakan harus mampu mengikuti keinginan pembuat kebijakan. Namun, proses implementasi kebijakan dapat menjadi kompleks jika sikap dan pandangan pelaksana kebijakan berbeda dari pembuat kebijakan. Dalam konteks perusahaan yang merencanakan Corporate Social Responsibility (CSR), sebagai pengambil kebijakan, mereka harus menyesuaikan CSR dengan kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, sebagai pelaksana kebijakan, perusahaan harus melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses sosialisasi CSR.

Indikator kedua yaitu kejujuran yang berkaitan dengan keterbukaan para pelaksana program mengenai hal yang berkaitan dengan implementasi CSR. Berdasarkan data hasil penelitian dapat diamati dari pernyataan informan yang menyatakan bahwa sikap pelaksanaan dalam implementasi CSR PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi mengenai kejujuran keterbukaan para pelaksana CSR kepada masyarakat belum maksimal. Masih rendahnya sikap kejujuran perusahaan mengenai dana yang akan dikeluarkan untuk penyaluran CSR kepada pemerintah desa dan pihak terkait. Perusahaan juga tidak ada keterbukaan dan bersosialisasi dengan masyarakat yang ada disekitar perusahaan itu berdiri, masyarakat sekitar perusahaan yang mengalami dan merasakan langsung dampak dari perusahaan tersebut, perusahaan belum merangkul secara baik dengan masyarakat sekitar. Menurut teori Edward III (Dalam Nugroho, 2009). Kejujuran merupakan karakter dan kualitas yang harus dimiliki oleh para pelaksana. Jika para pelaksana memiliki sikap yang positif, mereka akan dapat menjalankan kebijakan sesuai dengan harapan pengambil kebijakan. Sebaliknya, proses implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif jika sikap dan perspektif para pelaksana berbeda dari pengambil kebijakan. Integritas PT Sapta Sentosa Jaya Abadi dalam praktik CSR tercermin dari keterbukaannya terhadap masyarakat. Dalam hal ini seharusnya keterbukaan kejujuran dalam menjalankan CSR harus diterapkan kepada pihak terlibat maupun masyarakat agar saling bekerja sama dan mendapat empati dari khalayak banyak serta meminimalisir kecurigaan dan kesalahpahaman yang terjadi.

D. Struktur Birokrasi

Pada aspek struktur birokrasi terdapat dua indikator yang mempengaruhi implementasi kebijakan program CSR. Pertama yaitu *Standar procedure operating (SOP)*. Berdasarkan hasil temuan bahwa PT Sentosa Jaya Abadi sudah memiliki *Standar procedure operating (SOP)*, tetapi dalam pengimplementasiannya belum berjalan dengan maksimal dikarenakan dalam implementasi CSR PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi hanya menyalurkan kewajiban dan tanggung jawab sosialnya

hanya berdasarkan ajuan proposal saja, jika tidak ada ajuan maka CSR pun tidak disalurkan, bantuan yang diberikan pun masih terbatas dan pada akhirnya hanya melahirkan kegiatan CSR yang bentuknya karitatif atau sumbangan semata yang jauh dari konteks tanggungjawab berkelanjutan (*sustainable responsibility*) Pemerintah desa dan masyarakat mengharapkan bahwa PT.Sapta Sentosa Jaya Abadi dapat lebih memperhatikan lingkungan sekitar dan juga penyaluran apa yang harus disalurkan dan bersifat berkelanjutan. Berdasarkan pendapat George Edward III (Dalam Leo Agustino, 2020) menyatakan bahwa SOP adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparat, administrator, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya (*days-to-days politics*) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga). Edward III (Dalam Widodo, 2010) menyatakan bahwa : demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. PT.Sentosa Jaya Abadi sudah memiliki SOP, tetapi dalam pengimplementasiannya belum berjalan dengan maksimal dikarenakan dalam implementasi CSR PT.Sapta Sentosa Jaya Abadi hanya menyalurkan kewajiban dan tanggung jawab sosialnya hanya berdasarkan ajuan proposal saja, jika tidak ada ajuan maka CSR pun tidak disalurkan. Seharusnya tanpa ajuan proposal CSR wajib disalurkan.

Indikator kedua yaitu struktur organisasi pelaksana CSR. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan CSR PT.Sapta Sentosa Jaya Abadi memiliki pelaksana CSR yang terdiri dari bidang Hubungan Masyarakat (Humas) dan Ketua Tata Usaha (KTU), manager, driver, security saja. Dalam hal ini implementasi CSR PT.Sapta Sentosa Jaya Abadi belum memiliki divisi khusus yang menangani CSR ini aktivitas CSR masih dirangkap oleh divisi Hubungan Masyarakat (Humas) dan KTU serta beberapa pegawai lainnya. Hal ini tentunya mempengaruhi dalam implementasi CSR yang dijalankan karena dalam implementasi CSR harus memiliki SDM yang kompeten dalam melaksanakan CSR. Hal ini tidak jarang menyebabkan program CSR menjadi terfragmentasi dan tidak terkoordinasi dengan baik. Seperti yang diungkapkan oleh George Edward III (Leo Agustino, 2020), tujuan dari struktur organisasi atau pembagian kerja adalah untuk membagi tanggung jawab atas berbagai kegiatan, acara, atau program ke dalam beberapa unit kerja, masing-masing sesuai dengan bidangnya masing-masing. Implementasinya akan lebih efektif karena dilakukan oleh organisasi yang berkompeten dan berkemampuan dibandingkan struktur birokrasi.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi

a. Faktor pendukung

1. Dukungan dari pihak lain

Dukungan dari pihak lain seperti pemerintah desa, kepala dusun dan tokoh masyarakat memainkan peran penting dalam keberhasilan berbagai program dan inisiatif. Keterlibatan ini tidak hanya memperkaya perspektif dan sumber daya yang tersedia, tetapi juga meningkatkan legitimasi dan keberlanjutan program. Pemerintah desa dapat memfasilitasi sosialisasi program CSR ini, memberikan penyaluran CSR yang diikutsertakan oleh kepala dusun, tokoh masyarakat dan juga pihak terkait lainnya. Dengan kolaborasi yang erat dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, program-program ini lebih mungkin mencapai tujuan yang diinginkan, serta menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan. Berdasarkan hasil temuan Dalam implementasi program CSR PT.Sapta Sentosa Jaya Abadi ini pastinya perlu dukungan atau partisipasi dari pihak lain. Perusahaan memiliki program yang diperuntukkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi jika hanya dari perusahaan itu sendiri tentu sangat akan kesulitan. Oleh karena itu, partisipasi dari pihak lain sangat memberikan manfaat dan dorongan bagi guna keberhasilan implementasi CSR. Partisipasi dari pihak lain ini dapat berupa adanya fasilitas yang

disediakan pemerintah desa untuk mengadakan pertemuan sosialisasi, mendampingi para pelaksana CSR dalam menyalurkan bantuan CSR di lokasi penyaluran bantuan dan lainnya.

2. Tenaga kerja Dominan Masyarakat Desa

Tenaga kerja yang dominan berasal dari masyarakat desa memiliki hubungan yang erat dengan implementasi Corporate Social Responsibility (CSR). Ketika perusahaan memilih untuk merekrut pekerja dari komunitas desa sekitar, ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja lokal tetapi juga membawa dampak lebih luas dalam strategi CSR mereka. Dalam hal ini perusahaan PT Sapta Sentosa Jaya Abadi lebih mengutamakan putra daerah sebagai pekerja. Ungkapan dari pihak perusahaan tersebut merupakan kabar baik bagi masyarakat yang belum mendapat pekerjaan, oleh karena itu perusahaan membuka lapangan pekerjaan yang dominan diprioritaskan putra daerah. Pada Perekrutan pekerja yang dilaksanakan oleh perusahaan PT Sapta Sentosa Jaya Abadi mendapat kabar baik bagi masyarakat desa Lubuk Pinang karena lebih diutamakan oleh perusahaan diperuntukkan masyarakat desa. Dengan demikian, memperhatikan komposisi pekerja dari masyarakat desa dalam strategi CSR dapat menjadi faktor penting dalam menciptakan nilai tambah sosial dan ekonomi yang berkelanjutan bagi komunitas lokal di sekitar operasi perusahaan.

b. Faktor penghambat

1. Anggaran

Salah satu penyebab gagalnya penyaluran CSR dan tidak optimalnya bantuan yang diberikan kepada masyarakat adalah masalah anggaran. Kurangnya anggaran merupakan salah satu kendala utama yang menyebabkan bantuan yang diberikan menjadi terbatas. Dalam konteks program-program sosial atau CSR, keterbatasan anggaran sering kali mengakibatkan cakupan bantuan yang dapat disalurkan kepada masyarakat menjadi terbatas baik dalam jumlah maupun kualitasnya. Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas dan dampak dari program bantuan tersebut. Misalnya, proyek infrastruktur seperti pembangunan fasilitas kesehatan atau pendidikan mungkin tidak bisa sepenuhnya terealisasi, atau bantuan langsung seperti sembako dan beasiswa mungkin hanya bisa diberikan kepada sebagian kecil penerima manfaat.

Pada implementasi CSR ini, kendalanya yaitu perusahaan tidak bisa memenuhi keseluruhan proposal yang diajukan kepada pihak perusahaan karena keterbatasan anggaran. Karena perusahaan tidak mempunyai anggaran sepenuhnya terhadap proposal ini pengajuan, karena akan terus ada yang mengusulkan jadi dana itulah yang diberikan, perusahaan hanya menyalurkan bantuan tidak sepenuhnya tetapi hanya membantu semampunya saja, kendalanya adalah perusahaan tidak bisa memenuhi sesuai dengan apa yang diminta masyarakat itu.

2. Belum Adanya Susunan Kerja Yang Tetap

Belum adanya susunan kerja Corporate Social Responsibility (CSR) yang tetap di banyak perusahaan menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program-program sosial yang berkelanjutan. Tanpa adanya kerangka kerja yang jelas, perusahaan sering kali kesulitan dalam merumuskan strategi CSR yang efektif dan terukur. Hal ini dapat mengakibatkan inisiatif yang dilakukan tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan menjadi kurang optimal.

Pada implementasi CSR PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi pada kenyataannya belum adanya susunan kerja yang tetap pertahunnya serta tidak ada dana yang ditetapkan pertahun untuk realisasi CSR. Dana yang digunakan untuk penyaluran CSR hanya sesuai dengan proposal yang masuk ke perusahaan, maka akan dibantu tetapi tidak sepenuhnya. Seharusnya program CSR ini disusun dan terprogram dengan baik mengenai bantuan yang harus di realisasikan kepada masyarakat, dana yang ditargetkan pertahunnya untuk realisasi CSR. Tetapi pada kenyataannya penyaluran CSR mengalir tanpa adanya susunan kerja yang baik.

3. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai CSR

Corporate social responsibility atau biasa disebut dengan CSR adalah kewajiban perusahaan yang diimplementasikan kepada masyarakat sekitar sehingga sesuai dengan UUPT bahwa setiap perusahaan BUMN maupun swasta wajib memberikan CSR kepada masyarakatnya. Masyarakat juga harus mengetahui makna dari CSR bukan hanya dari perusahaan itu saja. Makna CSR masih asing ditelinga masyarakat sehingga hal ini menjadi faktor penghambat, sehingga masyarakat tidak mengetahui apa makna dari CSR, apa yang harus diterima perusahaan itu, masyarakat tidak mengetahui apa yang dilakukan perusahaan bahkan acuh.

Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa itu CSR bahkan belum mendengarnya sama sekali. Kurang pemahaman masyarakat terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR) sering menjadi tantangan dalam implementasinya. CSR merupakan konsep di mana perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, namun pemahaman yang rendah dari masyarakat dapat mengakibatkan kurangnya dukungan atau partisipasi aktif dalam program CSR. Pemahaman yang terbatas bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya komunikasi yang efektif dari perusahaan, kompleksitas konsep CSR itu sendiri, atau kurangnya kesadaran akan manfaat yang dapat diperoleh oleh masyarakat dari program CSR. Akibatnya, inisiatif CSR mungkin tidak sepenuhnya dimanfaatkan atau tidak diterima dengan baik oleh masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaatnya.

4. Belum Adanya Tim Yang Khusus Untuk Menangani CSR

Belum adanya tim khusus untuk menangani *Corporate Social Responsibility* (CSR) sering kali menjadi hambatan dalam efektivitas implementasi CSR di banyak perusahaan. Tanpa keberadaan tim yang didedikasikan secara eksklusif untuk mengelola dan mempromosikan kegiatan CSR, perusahaan mungkin menghadapi tantangan dalam merancang, melaksanakan, dan mengukur dampak dari inisiatif CSR mereka.

Berdasarkan penelitian dapat dilihat bahwa memang ada sebuah tim yang melaksanakan CSR pada PT Sapta Sentosa Jaya Abadi, tetapi pelaksana CSR hanya diambil dari pegawai perusahaan itu sendiri. Pada perusahaan PT Sapta Sentosa Jaya Abadi belum ada tim khusus yang menangani CSR, aktivitas CSR hanya dirangkap oleh divisi humas, KTU, security, manager dan supir. Ketidakhadiran tim khusus ini dapat mengakibatkan fragmentasi dalam pendekatan CSR, di mana berbagai departemen mungkin memiliki tanggung jawab yang terpisah terkait CSR tanpa koordinasi yang baik.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Sapta Sentosa Jaya Abadi belum mencapai tingkat optimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya kekurangan dalam beberapa aspek kunci, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian menunjukkan bahwa indikator-indikator dalam aspek-aspek tersebut belum sepenuhnya memenuhi standar yang telah ditetapkan, mengakibatkan pelaksanaan program CSR yang kurang maksimal. Untuk meningkatkan efektivitas CSR-nya, perusahaan perlu melakukan evaluasi dan perbaikan pada aspek-aspek yang masih kurang optimal tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Sapta Sentosa Jaya Abadi dilihat dari faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukungnya yaitu adanya sinkronisasi antara usulan dari desa penyangga dengan program CSR yang bekerja sama dalam melaksanakan program CSR PT Sapta Sentosa Jaya Abadi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Lubuk Pinang. Sedangkan faktor penghambat yang menjadi kendala yaitu belum terciptanya koordinasi yang tepat antara perusahaan dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika

- Agustino,leo.2020.*Dasar-Dasar Kebijakan Publik*.bandung:alfabeta
- Aditya, D. A. (2011). Implementasi Corporate Social Responsibility (Csr) Terhadap Perusahaan (Studi Di PT Sidomuncul Semarang). *Universitas Negeri Semarang, Semarang*.
- Basrowi,2008,*memahami penelitian kualitatif*. Jakarta: Rineka cipta
- Fatwaningsih, R. A. (2016). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility di PT Madubaru (PG PS Madukismo). *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran-S1*, 5(5), 500-511.
- Indiahono dwiyanto.2009. *kebijakan publik: Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta : gava media
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Bandung
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Rachmawati, D., & Pinem, D. B. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan. *Equity*, 18(1), 1–18. <https://doi.org/10.34209/equ.v18i1.456>
- Roza, S. (2014). Perencanaan, Implementasi Dan Evaluasi Program CSR (Corporate Social Responsibility). *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, 3(1), 407-416.
- Mapisangka, A. (2009). Implementasi CSR terhadap kesejahteraan hidup masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 1(1).
- Marnelly, T. R. (2012). Corporate social responsibility (CSR): Tinjauan teori dan praktek di Indonesia. *Jurnal aplikasi bisnis*, 2(2), 49-59.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta